PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M ARIF MAHESA

NPM : 22.10.0012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: M Arif Mahesa
Npm	: 22.10.0012
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	:Perlindungan Hak Perdata Serta Hak Atas Ganti Kerugian Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam Akibat Deforestasi

Palembang, 1 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum	Jhoni Hasyim, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Emiwati, S.H.,M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Arif Mahesa

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Mei 2002

NPM : 22.10.00.12

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan diri pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang 1, September 2026

Yang membuat pernyataan



M. Arif Mahesa

Npm. 22.10.00.12

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Deforestasi yang mengakibatkan bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Secara normatif, Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjamin hak korban bencana memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya sehingga perlindungan hak keperdataan serta pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak bencana akibat deforestasi belum terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak keperdataan korban bencana alam serta menganalisis perlindungan hukum dan hak atas ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bencana akibat deforestasi memiliki hak atas perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan, serta hak menuntut ganti kerugian apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif, pengawasan terhadap deforestasi, serta optimalisasi tanggung jawab pemerintah dan pelaku perusakan lingkungan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan masyarakat secara berkelanjutan..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kperdataan, Ganti Kerugian, Deforestasi, Bencana Alam.

ABSTRACT

Deforestation-induced natural disasters cause not only environmental damage but also infringements upon the civil rights of the community. Normatively, Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code govern liability for unlawful acts; Article 26 of Law Number 24 of 2007 guarantees the right of disaster victims to protection and the fulfillment of basic needs; and Law Number 32 of 2009 mandates the preservation of the environment. However, in practice, a gap remains between legal norms and their implementation, meaning that the protection of civil rights and the provision of compensation to communities affected by deforestation-induced disasters have not been optimally realized. This issue forms the basis of this study. The research aims to identify the civil rights of natural disaster victims and to analyze the legal protection and rights to compensation for communities affected by deforestation. A normative-juridical research method was employed, utilizing statutory, conceptual, and literature-based approaches, with data analyzed qualitatively. The findings indicate that victims of deforestation-induced disasters are entitled to legal protection, the fulfillment of basic needs, and rehabilitation, as well as the right to claim compensation if the elements of an unlawful act—as stipulated in the Civil Code—are met. Legal protection is provided through preventive and repressive measures based on prevailing laws and regulations. Therefore, effective law enforcement, oversight of deforestation activities, and the optimization of accountability for both the government and parties responsible for environmental destruction are essential to ensure legal certainty, justice, and the sustainable protection of the community's civil rights.

Keywords: *Legal Protection, Civil Rights, Compensation, Deforestation, Natural Disaster.*